

Pertanggungjawaban Sebuah Badan Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Mitran Kerjanya "(Studi Putusan Nomor 20/PDT.G/2014/PN.SBR JO Putusan PT Bandung NO. 118/2015/PT.BDG JO Putusan MA NO. 3125/K/PDT/2015 JO Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 489/PK/PDT/2018)" = Liability of a Legal Entity for Acts Against Law Carried Out by Its Partners" (Study Decision No. 30/Pdt.G/2014/PN.Sbr jo Decision of PT Bandung No. 118/Pdt/2015/PT.BDG jo Supreme Court Decision No. 3125/K/PDT/2015 jo Supreme Court Review Decision No. 489

Fenny Kusumaningtyas, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920527050&lokasi=lokal>

Abstrak

Koperasi menjadi bagian dari tata susunan ekonomi, yang berarti dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi terwujudnya kehidupan ekonomi yang sejahtera baik bagi orang-orang yang menjadi anggotanya itu sendiri atau pun masyarakat sekitarnya. Koperasi memiliki peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari masyarakat yang perekonomiannya terbatas. Dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat yang terbatas, Pemerintah Indonesia memperhatikan perkumpulan koperasi, apalagi sejak adanya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa koperasi menjadi soko guru perekonomian Indonesia, maka kedudukan hukum koperasi semakin diperhatikan. Sejak saat itu koperasi di Indonesia mulai bermunculan dan dilatarbelakangi oleh upaya agar terciptanya kesejahteraan rakyat khususnya dalam sektor perekonomian. Meski pun aturan-aturan mengenai Koperasi telah diatur secara rinci, namun tetap saja banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan, terlebih terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana serta tidak adanya perlindungan bagi nasabah penyimpan dana di Koperasi Simpan Pinjam menjadikan potensi terjadinya penyimpangan, seperti dalam Putusan PN No. 30/pdt.G/2014/PN Sbr di mana putusan PN Sumber dianggap keliru dalam menafsirkan Pasal 1367 KUHPerdara yang mengikutsertakan sebuah koperasi turut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mitra kerjanya dan terdapat perbedaan penafsiran oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang justru membebaskan koperasi tersebut dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh mitra kerjanya

.....Cooperatives are part of the economic structure, which means that in their activities they take part in the realization of a prosperous economic life for both the people who are members themselves and the surrounding community. Cooperatives have a considerable role in structuring joint ventures among communities whose economies are limited. In order to advance the limited economy of the community, the Government of Indonesia pays attention to cooperative associations, especially since the existence of Article 33 of the [1945](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/tel:1945) Constitution, which emphasizes that cooperatives are the "soko guru" of the Indonesian economy. The legal position of cooperatives has become increasingly considered since the existence of Article 33. Since then, cooperatives in Indonesia have begun to emerge and are motivated by efforts to create people's welfare, especially in the economic sector. Although the rules regarding cooperatives have been regulated in detail, there are still many deviations, especially related to the collection and distribution of funds and the absence of protection for customers of

fund storage in savings and loan cooperatives, making potential deviations, as in PN Decision No. 30 / pdt. G/